



DAKWAH DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Nawawi

Mahasiswa Program Doktor Kajian Media dan Budaya UGM Yogyakarta

Abstract

Indonesia is a country which has so many ethnicities, tribes, cultures, languages, and religions. Such diversity is prone to conflict and discord and therefore, there must be a systematic, programmed, integrated, and sustainable effort to maintain the integrity of the nation and as a multicultural country.

A step to be taken to realize it is by planting a multicultural understanding to the society. Planting a multicultural understanding is not intended to eliminate differences but to eliminate bias, develop dialogs and get to know the differences among them, so that mutual respect and appreciation can be achieved. One form of planting a multicultural understanding can be a *dakwah* activity which applies a cultural approach that is grounded in universal values of humanity.

Keywords: Dakwah, Society, Multicultural, Universal Values

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman seperti ini rawan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karena itu harus ada upaya yang sistematis, terprogram, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara yang multikultural.

Langkah yang dilakukan adalah penanaman pemahaman tentang multikultural pada masyarakat. Penanaman pemahaman tentang multikultural tidak bertujuan menghilangkan perbedaan, tetapi untuk menghilangkan prasangka, menimbulkan dialog dan mengenal perbedaan sehingga saling menghormati dan menghargai. Wujud dari penanaman pemahaman multikultural adalah dengan aktivitas dakwah dengan pendekatan budaya yang berpijak pada nilai-nilai universal kemanusiaan.

Kata Kunci: Dakwah, Masyarakat, Multikultural, Nilai Universal

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari berbagai ragam kelompok suku, etnis, budaya, bahasa, agama dan lain-lain. Dengan keragaman tersebut maka bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang mempunyai "multikultural". Di sisi lain, kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak untuk merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang diharapkan dapat menjadi "*integrating force*"¹ yang mampu mengikat keragaman menjadi sebuah kesatuan yang kokoh.

Pada zaman Orde Baru, pengelolaan Keragaman Budaya nampaknya dilakukan dengan tangan besi, serta dipaksakan oleh penguasa. Itulah sebabnya mengapa dengan lengsernya Pak Harto, maka dalam era reformasi, tiba-tiba bangsa ini jadi kehilangan kendali, semua menjadi serba boleh dan serba sesukanya. Tidaklah mengherankan jika kita terlatih hanya untuk



“mendengarkan kepentingan diri sendiri”, bahkan harus menuntut pemenuhan kebutuhan diri sendiri tanpa mempedulikan hak orang lain sehingga kehilangan untuk berempati, dan cenderung menggunakan bahasa kekerasan, dan yang lebih parah lagi, tidak perlu mempertanggung jawabkan apapun yang kita katakan dan yang kita lakukan. Bahkan apapun yang dikatakan oleh penguasa, termasuk larangan untuk mencederai hak milik, bahkan hak hidup orang yang kebetulan berbeda dari kita, selalu hanya terlontar sebagai retorika sehingga secara tidak sengaja mengajarkan kepada kita untuk menjadi munafik.

Senada dengan tulisan di atas, Azyumardi Azra² mengatakan bahwa dengan berakhirnya sentralisme kekuasaan pada masa Orde Baru memaksakan yang keseragaman “monokulturalisme” telah memunculkan reaksi balik, yang mengandung implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya multikultural. Bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala “provinsialisme” yang hampir tumpang tindih dengan “etnisitas”. Kecenderungan seperti ini, jika tidak terkendali maka akan menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial-kultural, tetapi juga disintegrasi politik³.

Merebaknya krisis sosio-kultural dalam masyarakat dapat dilihat dalam berbagai bentuk, misalnya; disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia yang nyaris kebablasan, hilangnya kesabaran sosial dalam menghadapi sulitnya kehidupan⁴ menyebabkan masyarakat mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan anarkis, masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk berempati, bersopan santun, saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan keragaman. Bangsa kita mulai kehilangan identitas kultural nasional dan lokal, padahal identitas nasional dan lokal sangat diperlukan untuk mewujudkan integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang multikultural, maka harus ada upaya yang sistematis, terprogram, terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah strategis yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui penanaman pemahaman tentang multikultural segenap lapisan masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan formal, informal maupun non-formal⁴.

Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah paradigma yang menganggap adanya kesetaraan antar ekspresi budaya yang plural. Multikulturalisme mengusung kesadaran sosial bahwa di dalam ranah kehidupan masyarakat terdapat keragaman budaya⁵. Kesadaran tersebut berdimensi etis yang menuntut tanggungjawab yang terarah pada ortopraksis (tindakan baik dan benar), yang selanjutnya terwujud ke dalam berbagai bentuk penghargaan, penghormatan, perhatian, kasih sayang, cinta, dan pengakuan akan eksistensi terhadap sesama.

Pengertian multikulturalisme yang diberikan para ahli sangat beragam. Multikulturalisme pada dasarnya merupakan pandangan dunia (*worldview*), yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan kebudayaan, yang menekankan penerimaan terhadap adanya realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat⁶. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia (*worldview*) yang kemudian diwujudkan dalam “*politics of recognition*”⁷. Karena pengertian multikulturalisme sangat beragam, maka konsep dan prakteknya cenderung berkembang, maka Bikhu Parekh⁸ membedakan multikulturalisme ke dalam lima macam, yaitu:



1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu kepada kehidupan masyarakat di mana berbagai kelompok kultural yang menjalankan kehidupannya secara otonom dan terlibat adalah masyarakat yang ada pada sistem “*millet*” di Turki Usmani atau masyarakat Amish di Amerika Serikat. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.
2. Multikulturalisme Akomodatif. Dalam masyarakat yang plural, mereka yang memiliki kultur dominan membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.
3. Multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kelompok-kelompok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan, mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme didukung misalnya oleh kelompok *Quebecois* di Canada, dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bisa menerapkan syaria, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.
4. Multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern* dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok-kelompok minoritas menentang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara *genuine*. Jenis multikulturalisme seperti ini, sebagai contoh, diperjuangkan masyarakat kulit Hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Para pendukung multikulturalisme jenis ini sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernist, memandang seluruh budaya sebagai *resources* yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.

Penanaman Pemahaman Tentang Multikultural



Secara sederhana, penanaman pemahaman tentang multikultural dapat dimaknai sebagai proses untuk menumbuhkan kemampuan cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural⁹. Dengan adanya pengertian dan pemahaman tentang multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan tercabik.

Menurut HAR Tilaar, penanaman pemahaman multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang “inter-kulturalisme” seusai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “inter-kulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika Serikat dan ke Eropa¹⁰.

Mempertimbangkan semua perkembangan tersebut, pada tahun 1940-an dan 1950-an, di Amerika Serikat berkembang konsep pemahaman “interkultural” dan “inter-kelompok” (*inter-cultural and inter-group education*). Penanaman pemahaman tentang interkultural melalui pendidikan dan pemahaman pada hakikatnya merupakan *crosscultural education* untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat berbeda. Pada tahap pertama, penanaman pemahaman melalui pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu untuk tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas.

Selain itu, juga ditujukan untuk tumbuhnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain. Pada prakteknya penanaman pemahaman melalui pendidikan interkultural kurang berhasil dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat maka muncul gagasan tentang penanaman pemahaman multikultural.

HAR Tilaar menyatakan bahwa penanaman pemahaman tentang multikultural tidak bertujuan untuk menghilangkan perbedaan akan tetapi menghilangkan prasangka, menimbulkan dialog, mengenal perbedaan sehingga timbul rasa saling menghargai dan mengapresiasi¹¹. Dari sini diharapkan akan muncul modal kultural suatu bangsa karena bangsa yang kehilangan modal kultural akan sangat rawan perpecahan. Modal kultural ini lahir dari kekayaan kearifan lokal bangsa yang jika diangkat bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam konteks Indonesia yang dikenal amat majemuk, penanaman pemahaman multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan memerlukan upaya yang sistematis, terprogram, terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah strategisnya menanamkan pemahaman tentang multikultural melalui berbagai lembaga masyarakat, baik formal, informal maupun non-formal. Secara lebih spesifik, T Raka Joni (2008) mengemukakan ada 4 (empat) tataran yang secara terpadu harus dilakukan guna memfasilitasi tumbuhnya kemampuan untuk menghormati keragaman.¹² Empat tataran tersebut adalah:

1. *Personal level* (tataran personal), melalui pengasuhan (*parenting*) dalam keluarga yang harus menyemaikan kemampuan serta kebiasaan menghormati keragaman budaya.
2. *Organizational level* (tataran organisasional), baik pada jalur pendidikan formal, maupun lembaga pemberi kerja (kantor-kantor jawatan, dan perusahaan).



3. *Societal level* (tataran kemasyarakatan) dalam arti luas, yang seyogyanya selalu harus mengedepankan penghormatan kepada keragaman.
4. *System level* (tataran sistemik) melalui peraturan perundang-undangan, khususnya pada tataran personal, penanaman kesadaran multikultural sejak usia dini dalam masa parenting merupakan langkah yang sangat kreatif dan strategis dalam usaha pengelolaan kemajemukan bangsa. Seperti kata pepatah “belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu” sehingga penghormatan terhadap perbedaan akan melekat sepanjang hayat dalam diri seorang anak manusia. Secara sederhana memperkenalkan paradigma multikulturalisme pada anak dalam masa pengasuhan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dengan cara menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan menyampaikan cerita yang berisi pesan tentang multikulturalisme, antara lain dari dongeng, legenda, dan fabel.

Dalam penelitiannya, Ratnayu Sitaresmi menyimpulkan bahwa fabel atau dongeng binatang sangat mudah dipahami oleh anak, baik simbol bahasa, karakter, perilaku maupun interaksinya. Penilaian dan argumentasi yang kontekstual seperti dikatakan Sitaresmi sangat dibutuhkan dalam membangun paradigma multikulturalisme. Tentu saja diperlukan bantuan penjelasan tentang pengakuan adanya perbedaan yang melingkupi setiap karakter dalam fabel, kesepakatan yang terjadi, serta akibat buruk yang muncul kalau homogenitas dipaksakan menjadi penyelesaian akhir. Hal demikian akan sangat membantu terbentuknya pemahaman tentang paradigma multi kulturalisme pada diri anak sejak usia dini.¹³

Tema-tema dasar yang dapat diangkat ke dalam penanaman pemahaman tentang multikultural adalah tema yang sesuai dengan filosofis dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Tema-tema tersebut misalnya tema tentang agama/ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan/ kerakyatan, demokrasi dan keadilan sosial.

1. Tema Keberagaman atau Ketuhanan.

Tema keberagaman/ketuhanan merupakan tema yang cukup penting untuk pemahaman multikultural sebab semua agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh pemeluknya menjelaskan tentang keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Agama juga tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan manusia antara sesama manusia dan juga dengan makhluk Tuhan lainnya. Dengan demikian agama juga terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia. Ada keteraturan dan kedisiplinan yang semestinya ditaati oleh manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tema Kemanusiaan

Manusia di dunia ini tidak hidup sendirian, tetapi dikelilingi oleh masyarakatnya, komunitasnya dan alam sekitarnya. Secara hakiki manusia mempunyai ketergantungan dengan sesamanya, karena itu mereka harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya atas dasar sama rata dan sama rasa, dan oleh sebab itu mereka harus sedapat mungkin bersifat kompromi, guyub rukun, saling bekerja sama, saling membantu dan saling melengkapi. Tema Kemanusiaan ini dimaksudkan dapat membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia.

3. Tema Persatuan dan Kesatuan.



Tema ini lebih mengutamakan keutuhan bangsa, Negara dan masyarakat yaitu dengan menciptakan kehidupan yang harmonis antar sesama warga yang mempunyai keragaman budaya dalam rangka mewujudkan bangsa dan masyarakat yang bersatu.

4. Tema Kerakyatan

Salah satu bentuk budaya masyarakat Indonesia di antaranya adalah budaya musyawarah dan mufakat. Nurkholis Madjid memformulasikan elemen musyawarah sebagai faktor yang mampu menciptakan “harmoni ummat” secara hakiki. Musyawarah mengundang partisipasi yang ‘egaliter’ dari semua anggota masyarakat, sekalipun dalam kenyataan akan terdapat variasi pelaksanaan teknisnya. Tema Kerakyatan diharapkan dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan bermartabat

5. Tema Keadilan

Pengakuan terhadap pluralitas budaya merupakan suatu kesadaran untuk mengurangi batas atau sekat-sekat budaya dan itu bisa terwujud apabila proses transpormasi antar budaya dibangun dengan citra dan cita-cita yang penuh persahabatan dan perdamaian. Tema Keadilan, dimaksudkan dapat membentuk sikap empati terhadap orang lain serta memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia, merasa sama dan sederajat dalam hubungan sosial dan anti terhadap diskriminasi atau marjinalisasi.¹⁴

Multikulturalisme: Keniscayaan dalam Dakwah Antarbudaya

Dahulu, sewaktu radio, televisi, CD dan HP masih sangat langka, hidup terasa sangat damai meskipun masyarakat terlihat masih berselimut keluguan, kepolosan dan penuh irasionalitas. Sekarang, hampir setiap penduduk terutama di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk glamournya kota memiliki apa yang dahulu dianggap langka dan mahal itu. Bagi sebagian kecil masyarakat, ada banyak sikap positif akibat mudahnya mengakses informasi dan menjadikannya kesempatan lebih banyak tahu kejadian-kejadian maupun temuan-temuan yang tak dijumpai di sekitar lingkungannya. Bagi mereka ada yang sadar bahwa ternyata dunia ini tidak sekecil *daun kelor* merupakan kesempatan untuk meningkatkan tarap hidupnya. Tidak hanya Informasi kenyataan sosial dan hiburan bahkan informasi berbagai budaya di tanah air dan dunia luar dapat dilihat dan disaksikan hingga pada kesimpulan bahwa manusia ini banyak dan beragam, dinamis, beraneka budaya, agama dan kepercayaan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Paham, sadar dan pengakuan tulus dan kritis terhadap realitas majemuk ini dikenal dengan jargon multikulturalisme.¹⁵

Multikulturalisme dalam agama maupun budaya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dibantah. Orang yang mengajak agar melestarikan lingkungannya, mencintai dan menyayangi sesama manusia, saling menghargai dan menghormati, kompetisi sehat dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya ternyata bukan hanya monopoli khotbah Sang Pastor di gereja-gereja, nasehat-nasehat mubaligh di podium, para politisi dalam kampanye pemilu atau sikap biksu dan pendeta bijak pada keyakinan dan ajaran-ajaran agama yang berbeda. Sikap saling membela dalam mempertahankan budaya dan tradisi suatu masyarakat tidak hanya monopoli kaum primitif yang hidup di hutan nan jauh dari keramaian kota seperti suku-suku di Papua dan Kalimantan, tetapi hampir setiap masyarakat menyatu dengan budayanya berhak untuk melestarikannya. Apalagi di era teknologi informasi sekarang, batas-batas budaya, baik secara



sosiologis maupun geografi sudah sulit untuk dibatasi dan memudahkan untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta dan kenyataan ini jelas dapat menimbulkan situasi dan suasana tidak menentu bahkan membingungkan bagi sebagian orang, terutama mengandalkan mental interaksi hidupnya pada tradisi hegemoni mayoritas. Konflik kepribadian (*personality conflict*), konflik individu maupun konflik kelompok dengan latar belakang budaya dan kepentingan yang berbeda-beda terjadi tak terelakkan. Salah satu jalan untuk menyikapinya atas kenyataan pluralitas ini adalah dengan cara dan sikap mengakui kenyataan tersebut. Kemudian saling mengenal dan bekerjasama dalam memelihara kehidupannya.¹⁶

Pengakuan terhadap keragaman beragama misalnya, tidak bisa dilaksanakan apabila dalam diri seseorang masih ada perasaan curiga dan prasangka buta yang saling menyalahkan bahkan mencaci agama dan kepercayaan yang ada di luar dirinya. Meskipun setiap agama mempunyai landasan doktriner untuk menyebarkan ajarannya, penyebaran tersebut tetap harus dilakukan dalam suasana saling menghormati kepercayaan agama orang lain. Kasus *per* kasus tragedi kemanusiaan atas nama agama sudah banyak kita saksikan sebagai bukti bahwa keragaman perbedaan adalah keniscayaan yang harus diakui keberadaannya. Bahkan suatu proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sering berakhir dengan benturan antar aparat dan warga hanya karena proyek pembangunan tersebut menyinggung dan mengganggu kebiasaan dan adat-istiadat dalam kelangsungan hidup masyarakat setempat.¹⁷

Begitu juga dengan dakwah, tidak akan jauh mengalami nasib yang sama apabila pelaksanaan dakwah tersebut tidak memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai budaya termasuk tradisi beragama yang dianut masyarakat. Dakwah tersebut akan ditolak dan segera ditinggalkan umat. Padahal, selain untuk diri sendiri, dakwah dilakukan untuk membimbing umat. Aktivitas dakwah pada era sekarang dituntut melakukan upaya-upaya dan pendekatan-pendekatan dakwah yang lebih bisa mengayomi dan mempertimbangkan budaya-budaya masyarakat tertentu yang berpijak pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Dakwah merupakan suatu proses, maka layaknya suatu proses mesti dilakukan dengan cara-cara dan strategi yang lebih terencana, konseptual dan terus-menerus (*continue*) seraya terus meningkatkan pendekatan-pendekatan yang lebih ramah tanpa mengubah maksud dan tujuan dakwah.¹⁸

Rekonstruksi strategis-konseptual dan reorientasi tujuan dakwah mesti dilakukan, karena dakwah Islam umumnya masih diyakini berdasar pada al-Quran, maka upaya-upaya rekonstruksi, reinterpretasi pemahaman atas teks-teks al-Quran mesti dilakukan guna menghindari jurang perbedaan yang terlalu jauh antara pemahaman-pemahaman atas makna dan praktek yang seharusnya (*das sein*) dipahami dai dengan praktek-praktek penganut agama (*das sollen*) yang tidak lepas dari pengaruh-pengaruh budaya masyarakat. Tanpa upaya-upaya sinergi dan komprehensif ini, seperti pendekatan yang terlalu tekstual dan leterlek terhadap pemahaman teks-teks kitab suci akan terasa jauh panggang dari api. Pendekatan seperti ini, bukannya mempermudah menyampaikan pesan-pesan Qurani, bahkan akan kembali ke belakang (*set back*), kalau bukan akan bertabrakan dan kontra produktif dengan arus dinamisnya budaya masyarakat yang cenderung materialistis dan hedonis seperti terjadi pada masa sekarang.¹⁹ Nilai-nilai universal dalam al-Qur'an, jika meminjam rekonstruksi teori-teori yang dibangun para pemikir muslim kontemporer dalam memahami teks al-Qur'an, seperti Hassan Hanafi, Mohammad Arkoun, Muhammad Sahrur dan Nasr Hamid Zaid maka sketsa nilai-nilai al-Qur'an universal itu terdapat pada kurun periode Mekkah. Mungkin suasana lebih tepat apabila tema-tema universal itu mengemuka disampaikan para dai antar-budaya



yang peduli kuat terhadap perubahan dan pembangunan umat pada masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Pengakuan Al-Quran Tentang Keragaman

Klaim al-Qur'an bahwa Islam bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*) adalah respons positif bagi perkembangan masyarakat multikultural. Hal ini bukan hanya semata-mata slogan dan respons terhadap kecenderungan modernitas yang banyak mengemuka akhir-akhir ini, tetapi lebih dari itu memiliki landasan doktrin dalam teks-teks Kitab Suci:

*"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan Kami pun menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian"*²⁰

Kualitas manusia cenderung tidak hanya dipandang dari sisi-sisi *simbolik-asesoris* belaka, meskipun dari pandangan sosiologis sah dalam ukuran manusia.²¹ Terkadang di antara kita lebih senang berteman dengan lelaki rupawan atau wanita cantik, lebih suka berdekatan dengan orang bertitel dan hartawan dari pada dengan orang cacat atau orang miskin, gelandangan dan pengemis. cenderung bersikap tidak adil dalam perlakuan hubungan sosial. Pengakuan universalnya adalah nilai kemanusiaan yang setiap orang harus menghormatinya tanpa terlalu terpaku pada label luar dan aksesoris yang melekat. Sebab simbol-simbol dan label itu akan terus menerus berubah sesuai perkembangan peradaban manusia. Apabila memberikan penghormatan dan penghargaan mencakup terhadap simbol-simbol dan label itu, maka logikanya akan lain.

Isyarat lain misalnya termaktub dalam ayat yang terjemahannya berbunyi; *"...Kalau saja Allah menginginkan, niscaya Dia akan menciptakan manusia sebagai satu bangsa yang monolitik (seragam). Tetapi mereka senantiasa menunjukkan perbedaan."*²²

Teks-teks terjemahan bebas di atas, oleh kalangan sementara ulama *mutakhirin* seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Thabataba'i merupakan isyarat al-Quran atas pengakuan terhadap keragaman manusia dan kebudayaannya. Dalam bahasa lain, perbedaan budaya, agama dan kepercayaan merupakan *orders of nature* atau *sunnatullah*. Karenanya keragaman ini mestinya dijadikan sarana jalan, kerjasama dan kompetisi guna mencapai yang terbaik.²³

Dalam dakwah antarbudaya, keragaman merupakan tantangan dai agar lebih mampu meramu pesan-pesan dakwah yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi positif budaya *mad'u* termasuk di dalamnya mengkondisikan cara-cara dan media yang dianggap dekat dengan ukuran budaya suatu masyarakat. *"Ajaklah (mad'u) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (bijaksana; sesuai ruang dan waktu), dengan tauladan (sikap tindak-tanduk dan tutur kata) yang baik, kemudian berdialog/berdebat juga dengan cara yang lebih baik."*²⁴

Salah satu alat yang paling sering digunakan, jika bukan yang paling dominan, digunakan para dai adalah bahasa lisan. Dalam konteks dakwah antarbudaya maka bahasa dakwah pada masyarakat akan lebih tepat mengena tentunya dengan menggunakan bahasa lokal. Tujuannya tidak lain agar lebih mendekati dan memperoleh kesamaan dalam memaknai suatu gagasan. Begitu juga dalam materi dakwah, mengangkat isu politik yang terjadi di Timur Tengah misalnya, kurang tepat dibahas dalam pengajian ibu-ibu di pedesaan sebab tidak memiliki kesinambungan dengan kondisi tingkat kebudayaannya. Mungkin metode



dengan memberi contoh tentang praktek shalat dan bersuci misalnya, baik secara materi maupun metode akan lebih mengena bagi umumnya masyarakat awam. Begitu seterusnya sesuai konteks budaya dan tingkatan masyarakat yang dihadapinya.

Apabila di Indonesia yang lebih dari 600-an ragam etnik dan lebih 500-an bahasa ibu, maka sebanyak itulah dinamika dakwah dengan segenap unsur dakwah mesti terayomi. Ini belum mencakup dakwah antar bangsa yang multi kompleks membutuhkan teknologi dakwah dan lebih menekankan pada kecakapan internasional akan menambah tantangan bagi para dai dalam berdakwah yang sangat berpengaruh terhadap dinamika masing-masing sasaran dakwah.²⁵

Dakwah Antarbudaya

Berdasarkan pada analisis *teoritik-faktual* di atas, upaya-upaya membangun strategi dakwah yang lebih ramah dan damai, bagi para sarjana dakwah maupun praktisi dakwah khususnya, merupakan perkembangan ijtihad yang sangat signifikan. Meskipun dalam prakteknya sejak masa Rasulullah SAW. pun pelaksanaan dakwah yang lebih santun dan damai adalah senjata ampuh yang terdepan dipraktekkan. Suatu upaya renungan integratif antara hati, pikir, dan amal serta apresiasi terhadap perkembangan budaya pada satu sisi dan perkembangan ilmu dakwah pada sisi yang lain, sekecil apa pun mesti dilakukan. Karena dalam telaah dakwah antarbudaya, dakwah tidak hanya dipahami sebagai *the transfer of Islamic values* (transfer nilai-nilai Islam) yang luhur kepada manusia di bumi, tetapi hendaknya mengupayakan kesadaran nurani agar mengusung setiap budaya positif secara kritis tanpa melihat latar belakang budaya formal suatu masyarakat.

Dalam tradisi saling menghormati dan menghargai pada masyarakat misalnya, dengan ucapan *salam, permisi, punten*, dan merendahkan badan terkadang dipraktekkan silih berganti dan saling mengisi satu sama lain. Hal serupa terjadi pada masyarakat Jawa bahkan orang Jepang, karena sikap-sikap serupa tidak dapat menghapus makna dibalikinya yakni penghormatan atau penghargaan. Inilah kebiasaan Islam yang diharuskan al-Quran untuk melestarikannya: "*Waltakun minkum ummatun yad'una ilal-khairi wa ya'muruuna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil-munkar*."²⁶ (Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat umat yang menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang munkar).

Usaha-usaha mengetahui karakter budaya suatu masyarakat merupakan kunci utama dalam memahami dakwah antarbudaya. Agama mesti dibedakan dengan budaya meskipun sulit untuk dipisahkan. Mampu membedakan kategorisasi antara agama dan budaya bukan bertujuan untuk membedakannya kemudian memisahkan antara satu dengan lainnya, tapi lebih pada upaya analisis guna memadukan hal-hal yang positif apa yang ada dalam budaya dan agama pada sisi lain dengan cara pandang dakwah. Inilah ontologi dakwah antarbudaya yang signifikan pada era globalisasi sekarang.²⁷

Wujud Interaksi Simbolik Antara Dai dan *Mad'u*

Maksud wujud interaksi simbolik di sini adalah rumusan konseptual hasil pengamatan terhadap proses pelaksanaan dakwah, baik dakwahnya itu diterima maupun ditolak oleh *mad'u*. Rumusan konseptual ini sebagian besar berlandaskan pada konsep-konsep hasil penelitian para ahli ketika meneliti Islam dan dakwah Islam khususnya di Indonesia. Untuk *teori resepsi* misalnya, meminjam analisis sarjana Belanda Cristian Snouck Hurgronje²⁸, teori akulturasi dan teori simbol agama meminjam dari antropolog, yaitu Koentjaringrat (1986)



dan Clifford Geertz (1974), sementara untuk teori komplementer diperoleh dari Gus Dur (2006).

Sebagian teori-teori ini sebenarnya dapat dikenal juga terutama dalam antropologi dan sosiologi. Ini sangat membantu dalam mengamati fenomena dakwah dari sisi analisis ilmu sosial. Karenanya beberapa rujukan teoritik kepada ilmu sosial khususnya sosiologi, antropologi dan psikologi tidak bisa terelakan. Misalnya *Pertama, reception theory* (teori resepsi). Menerima sepenuhnya atau menerima sebagian gagasan budaya yang lain dan baru harus menjadi budaya masyarakat setempat terlebih dahulu adalah landasan utama teori ini. Penerimaan bisa terjadi karena gagasan dan budaya baru itu dianggap lebih baik dan menjanjikan terhadap perbaikan nasib hidup masyarakat. Standar suatu budaya masyarakat itu dianggap baik adalah apabila gagasan dan budaya itu telah teruji pada praktek masyarakat secara nyata²⁹. Karenanya penerimaan suatu budaya kemungkinan terjadi pada masyarakat *mad'u* yang jauh lebih mapan dan maju, kemudian diikuti dan ditiru oleh masyarakat lainnya dengan motivasi yang sama. Jadi secara umum masyarakat telah mempelajari, secara sengaja maupun tidak, dan mengetahui tentang pengalaman masyarakat yang ditirunya itu. Peniruan adalah langkah awal penerimaan suatu budaya baru atau budaya lain kemudian dipraktekkan. Fakta sejarah pengalaman ideal suatu masyarakat sering menjadi sandaran utama proses penerimaan terhadap gagasan-gagasan dan budaya baru dalam teori resepsi. Kondisi sosial masyarakat akan terlihat lebih harmoni dan berjalan lebih terkendali karena terjadi kesepahaman dan atau paksaan.

Kedua, acculturation theory (teori akulturasi) atau teori percampuran. Era globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap pola komunikasi dan sistem informasi, lebih dari itu, konsekuensi terjadinya pembauran budaya global tidak hanya berpengaruh pada ranah bersifat fisik tetapi juga mental. Sarana teknologi informasi dan transportasi telah mempermudah hubungan antar budaya semakin cepat dan kuat. Dalam era informasi global, hubungan antar manusia tidak hanya sebatas satu wilayah antar negara tetapi mencakup manusia sejangat.³⁰ Kemudahan hubungan (relasi) dan interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya menjadi bagian dari hubungan dalam dakwah lintas budaya.

Tuhan memang pantas berujar bahwa manusia diciptakan dari berbagai suku dan bangsa, rupa, bahasa bahkan agama agar manusia saling mengenal dan bertukar informasi, prestasi, saling berdialog dan bekerjasama karena manusia merupakan makhluk yang serba terbatas dalam bingkai kesempurnaan, ketergantungan antara satu dan lainnya menjadi sesuatu yang tak terbantahkan. Ini adalah fitrah hukum kemanusiaan agar terjadi saling kontak dan berkomunikasi. Dalam proses kontak dan komunikasi inilah, manusia saling melempar latar belakang budaya yang telah mereka pelajari menjadi suatu budaya sebagai identitasnya. Dari landasan teori ini, percampuran budaya, karena interaksi manusia akan kehadiran bentuk budaya lainnya merupakan kemestian. Setiap manusia komponen bangsa penghuni bumi ini memiliki kebudayaan, bahkan kebudayaan unggulan masing-masing anggota masyarakat untuk saling tukar secara terus-menerus dalam proses kehidupannya.

Ketiga, Resistance Theory (Teori Resistensi) atau teori penolakan.³¹ Dasar asumsi teori ini adalah bahwa setiap aktivitas dakwah akan selalu berhadapan variabel dai dan *mad'u*. Ketika interaksi terjadi, penentangan bahkan sikap dan respons penolakan tidak terelakan khususnya penolakan dari *mad'u*. Penolakan tersebut adalah konsekuensi logis akibat proses difusi budaya dari budaya yang berbeda. Dai menyampaikan pesan-pesan dakwah yang termasuk baru bagi komunitas masyarakat tertentu, maka budaya baru itu jelas mengancam



eksistensi budaya lama yang telah dipeluk masyarakat sejak lama yang sudah berurat berakar. Umumnya *mad'u* menganggap budaya baru itu aneh bahkan menyalahkannya. Budaya baru itu terkadang berbentuk gagasan, teori, dan tindakan yang teraktualisasi dalam proses interaksi masyarakat. Apabila gagasan-gagasan baru itu tidak memiliki landasan kuat dan tidak tersosialisasikan dalam pengalaman hidup serta tidak mendapat dukungan dari komponen masyarakat maka budaya yang dianggap baru tersebut akan ditolak masyarakat. Akan tetapi apabila budaya baru tersebut disosialisasikan secara terus-menerus, perlahan-lahan, apapun bentuknya akan diterima masyarakat.

Pengalaman Nabi Muhammad dalam dakwahnya, bahkan para nabi secara umum, merupakan bukti faktual resistensi terhadap gagasan-gagasan dan budaya-budaya baru dalam misi perubahan masyarakat. Keyakinan dan keberanian kuat akan kebenaran yang disampaikannya, dalam hal ini adalah wahyu, jelas menjadi tiang penyangga utama berhadapan dengan tatanan sistem lama yang lebih mapan dan kuat. Sikap reaktif, pertikaian paham dan peperangan sering tidak bisa dihindari sebagai bentuk interaksi antara *mad'u* dan dai. Tatanan suatu budaya (*order of culture*), termasuk budaya baru, tidak bisa dipungkiri terkadang menggeser dan menggusur tatanan dan pranata lama (*the old institution*). Keputusan akan siklus kehidupan harus diterima baik secara sukarela maupun terpaksa.

Tujuan dakwah pada dasarnya adalah; *Pertama*, mengubah tatanan masyarakat lama, baik secara evolusi maupun secara revolusi, nilai maupun kelembagaan dari suatu kondisi mengarah kepada suatu kondisi yang telah terkonseptualisasikan. *Kedua*, transformasi nilai-nilai Islam sebagai solusinya yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Ada beberapa kemungkinan apabila teori resistensi ini terjadi, misalnya, terjadi gejolak budaya pada level *mad'u* begitu juga gejolak pada diri sang dai. Atau terjadi gejolak antara dai dan *mad'u* dalam suatu kondisi tertentu. Terjadi kompromi budaya baik pada tataran kesadaran ide maupun pada tataran konkrit hasil produk budaya. Terjadi dominasi salah satu kekuatan gagasan dan budaya baik pada dai maupun *mad'u*, atau akan terjadi ketidakjelasan bentuk budaya yang mengarah pada format budaya baru dan atau kembali ke tradisi lama karena tidak adanya dominasi di antara budaya-budaya yang ada. Akan tetapi yang terakhir ini kemungkinan kecil terjadi.

Keempat, complementary theory (teori komplementer). Pembauran suatu budaya masyarakat, terlebih pada era globalisasi budaya sekarang ini adalah kemestian. Lalu lintas budaya antar budaya-budaya di dunia berjalan dengan cepat sehingga memungkinkan terjadi gesekan dan perpaduan budaya-budaya tersebut. Pada kenyataannya tidak sepenuhnya suatu budaya baru/budaya lain dapat diterima pihak suatu masyarakat dengan mulus bahkan bisa terjadi penolakan. Akan tetapi lambat-laun, setahap demi setahap, sebagian budaya luar dan baru itu diterima, bahkan dijadikan sebuah model dalam hubungan interaksi antar masyarakat. Antara budaya baru suatu masyarakat dan budaya lainnya bukan saling berbenturan (*clash of culture*) tetapi menjadi budaya yang saling mengisi (*complementary culture*).³²

Kesimpulan

Negara Indonesia terbentuk dari berbagai ragam kelompok suku, etnis, budaya, bahasa, agama dan lain-lain. Dengan keragaman tersebut bangsa Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang mempunyai "multikultural". Multikulturalisme merupakan paradigma yang menganggap adanya kesetaraan antar ekspresi budaya yang plural. Multikulturalisme mengusung kesadaran sosial kehidupan masyarakat terdapat keragaman budaya. Kesadaran tersebut berdimensi etis



yang menuntut tanggungjawab yang terarah pada *ortopraxis* (tindakan baik dan benar), yang selanjutnya terwujud ke dalam berbagai bentuk penghargaan, penghormatan, perhatian, kasih sayang, cinta, dan pengakuan akan eksistensi terhadap sesama.

Penanaman pemahaman tentang multikultural bertujuan untuk menghilangkan prasangka, menimbulkan dialog, mengenal perbedaan sehingga timbul rasa saling menghargai dan mengapresiasi. Dari sini diharapkan akan muncul modal kultural suatu bangsa karena bangsa yang kehilangan modal kultural akan sangat rawan perpecahan. Modal kultural lahir dari kekayaan kearifan lokal bangsa yang jika diangkat bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam konteks Indonesia yang amat majemuk, penanaman pemahaman multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Multikulturalisme dalam agama maupun budaya merupakan keniscayaan yang tidak bisa dibantah. Orang mengajak melestarikan lingkungannya, mencintai dan menyayangi sesama manusia, saling menghargai dan menghormati, kompetisi sehat dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya ternyata bukan hanya monopoli khotbah Sang Pastor di gereja-gereja, nasehat-nasehat mubaligh di podium, para politisi dalam kampanye pemilu atau sikap biksu dan pendeta bijak pada keyakinan dan ajaran-ajaran agama yang berbeda. Sikap saling membela dalam mempertahankan budaya dan tradisi suatu masyarakat tidak hanya monopoli kaum primitif yang hidup di hutan nan jauh dari keramaian kota seperti suku-suku di Papua dan Kalimantan, tetapi hampir setiap masyarakat menyatu dengan budayanya berhak untuk melestarikannya. Apalagi di era teknologi informasi sekarang, batas-batas budaya, baik secara sosiologis maupun geografi sudah sulit untuk dibatasi dan memudahkan untuk berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu jalan untuk menyikapinya atas kenyataan pluralitas ini adalah dengan cara dan sikap mengakui kenyataan tersebut, saling mengenal dan bekerjasama dalam memelihara kehidupannya.

Demikian pula dalam dakwah yang dilakukan untuk membimbing umat. Aktivitas dakwah pada era sekarang dituntut melakukan upaya-upaya dan pendekatan-pendekatan dakwah yang lebih bisa mengayomi dan mempertimbangkan budaya-budaya masyarakat dan berpijak pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Dakwah merupakan suatu proses, seharusnya dilakukan dengan cara-cara dan strategi yang lebih terencana, konseptual dan terus-menerus (*continue*) dan terus meningkatkan pendekatan-pendekatan yang lebih ramah tanpa mengubah maksud dan tujuan dakwah.

ENDNOTE

¹Azyumardi Azra, *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*, (Bandung: Mizan 2002), hlm. 30.

²*Ibid.*, hlm. 41.

³HAR. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm. 21.

⁴Anita Lie, *Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural*, (Jakarta: Kanisius, 2006), hlm. 61.

⁵Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm.13.

⁶Thomas La Belle & Christopher Ward, *Multiculturalism And Education*, (Albany: SUNY Press, 1994), hlm. 53.



- ⁷ Charles Tayler, *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition*, (Princeton: Princeton University Press, 1994), hlm. 35.
- ⁸ Bikhu Parekh, *National Culture And Multiculturalism*, (New Delhi: Amar Prahasan, 1997), hlm. 123-126.
- ⁹ Lindra Darnela, *Pembelajaran Multikultural: Belajar dari Pengalaman*. (Jakarta : Jembatan, 2006), hlm. 59.
- ¹⁰ HAR Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm 25.
- ¹¹ HAR Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hlm. 29.
- ¹² T Raka Joni, *Nurturing Cultural Diversity Competence in Indonesia*, (New York, The Chicago University Press, 2008), hlm. 41.
- ¹³ Ratnayu Sitoresmi, *Fungsi Fable untuk Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Resist, 2003), hlm. 44.
- ¹⁴ Anita Lie, *Mengembangkan Model Pendidikan Multikultural*, (Jakarta: Kanisius, 2006), hlm.78-86.
- ¹⁵ Afif Muhammad, *Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Pada Abad 21*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1997), hlm. 79.
- ¹⁶ Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif, Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 91.
- ¹⁷ Nurcholish Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 115.
- ¹⁸ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 97.
- ¹⁹ Amrullah Ahmad, *Dakwah dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Duta, 1983), hlm. 59.
- ²⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, al Hujurat, 13.
- ²¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 65.
- ²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, al Hud, 18.
- ²³ Hamka, *Prinsip Kebijaksanaan Dakwah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 83.
- ²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, al Nahl, 125.
- ²⁵ Hamka, *Prinsip Kebijaksanaan Dakwah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 96.
- ²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Ali Imran, 104.
- ²⁷ Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Makalah IAIN Syarif Hidayatullah, 1996), hlm.25.
- ²⁸ Hazairin, *Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 37.
- ²⁹ Clifford Geertz, *Santri, Priyayi, dan Abangan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 101.
- ³⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hlm. 45.
- ³¹ Abdurrahman Wahid, *Islam Kami, Islam Saya, dan Islam Anda*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), hlm. 56.
- ³² Abdurrahman Wahid, *Islam Kami, Islam Saya, dan Islam Anda*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), hlm. 57.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. 1983. *Dakwah dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Duta.
- _____. 1996. *Dakwah Islam Sebagai Ilmu*, Jakarta: Makalah IAIN Syarif Hidayatullah.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Identitas Dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Darnela, Lindra. 2006. *Pembelajaran Multikultural: Belajar dari Pengalaman*. Jakarta : Jembatan.
- Geertz, Clifford. 1980. *Santri, Priyayi dan Abangan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hamka. 1990. *Prinsip Kebijaksanaan Dakwah Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.



- Hazairin. 1992. *Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Joni, T Raka. 2008. *Nurturing Cultural Diversity Competence in Indonesia*. New York: The University Chicago Press.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pengembangan*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: AksaraBaru.
- La Belle, Thomas J & Christopher Ward. 1994. *Multiculturalism and Education*. Albany: SUNY Press.
- Lie, Anita. 2006. *Mengembangkan Model Pendidikan Multikultura.*, Jakarta: Kanisius.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 1997. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina.
- Muhammad, Afif. 1997. *Teologi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Pada Abad 21*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Komunikasi Efektif, Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parekh, Bikhu. 1997. *National Culture and Multiculturalism*, New Delhi: Amar Prahasan.
- Taylor, Charles et al. 1994. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.
- Tim Departemen Agama RI. 1984. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta.
- Tilaar, HAR. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sitairesmi, Ratnayu. 2003. *Fungsi Fabel untuk Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Resist.
- Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Jakarta: Gramedia.
- Tasmara, Toto. 1997. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islam Kami, Islam Saya dan Islam Anda*. Jakarta: The wahid Institut.